

BAB IV

K.H. ABUBAKAR BASTARI (1898-1971):

KIPRAH DAN PENGABDIANNYA

A. Kiprah dan Pengabdian di Bidang Politik

Perkembangan Agama Islam di Palembang diperkirakan masuk pada awal abad ke-1 H atau awal abad ke-8 Masehi. Sepanjang abad ke-7 sampai abad ke-14 Masehi, Islam di kota Palembang tumbuh dan berkembang pesat, dan bersamaan dengan itu zaman keemasan kerajaan Sriwijaya berangsur-angsur mulai pudar.

Setelah kejatuhan kerajaan Sriwijaya yang ditaklukan oleh kerajaan Majapahit (1375 M), wilayah Palembang dijadikan sebagai salah satu *vassal* atau wilayah pendudukan Kerajaan Majapahit, di bawah pimpinan Hayam Wuruk. Pemerintahan di Palembang diserahkan kepada seorang bupati yang ditunjuk langsung oleh Majapahit. Namun, banyaknya permasalahan di internal Kerajaan Majapahit membuat perhatian mereka terhadap wilayah-wilayah taklukannya tidak terlalu berjalan baik. Bahkan wilayah Palembang sempat dikuasai oleh para pedagang dari Tiongkok. Hingga akhirnya Majapahit kembali menguasai Palembang setelah mengutus seorang panglima bernama Arya Damar.

Dalam beberapa catatan sejarah disebutkan, ketika merebut kembali Palembang, Arya Damar dibantu oleh pangeran Kerajaan Pangruyung di Sumatera Barat bernama Demang Lebar Daun. Arya Damar kemudian memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Arya Abdillah. Beberapa naskah sejarah, termasuk

Babad Tanah Jawi, mengatakan bahwa Arya Abdillah adalah ayah tiri Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak.

Setelah melihat ketidakstabilan kekuasaan di Majapahit, Arya Abdillah kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa Palembang. Tetapi ia belum memiliki struktur pemerintahan yang baik untuk disebut sebagai sebuah kerajaan. Hingga akhirnya pada 1659, Palembang resmi menjadi kerajaan bercorak Islam dengan nama Kesultanan Palembang Darussalam.

Setelah Palembang resmi menjadi kerajaan yang bercorak Islam, maka pada masa itu Islam di Palembang mengalami perkembangan dan mencapai kejayaan dengan bermunculan tokoh agama Islam yang menyebarkan agama Islam di Palembang. Kejayaan Islam di Palembang tentu tidak terlepas dari kepemimpinan seorang penguasa yang kuat dalam menjalankan perintah agama. Selain penguasa di Palembang yang adpa saat itu disebut sebagai Sultan juga mempunyai seoeang penasehat di dalam menjalankan pemerintahan. Penasehat itu tidak lain adalah seorang ulama atau Şekh yang memiliki ilmu yang mumpuni atau tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya makam-makam uama, baik itu pemakaman Cinde Welan, Kawah Tengkrepep dan makam-makan Sultan Palembang lainnya. Di sana dapat dilihat bahwa di sebelah makam seorang Sultan, pasti ada makam gurunya atau seorang ulama. Hal ini membuktikan bahwa peran seorang ulama sangat penting di dalam suatu pemerintahan.

Dalam ruang lingkup Islam dan ajarannya ulama merupakan faktor terpenting dalam kehidupan masyarakat, ulama tidak hanya sebagai pewaris para Nabi tetapi juga sebagai penunjuk jalan kebenaran dan sebagai seorang yang mengembangkan

ajaran Islam yang merupakan tugas pokok seorang ulama yang sangat berat namun sangat mulia. Ulama selain perlu dihormati dan disegani karena ilmu yang mereka miliki, tetapi juga menjadi panutan dan penuntun menuju kebenaran yang hakiki. Sehingga kehidupan di dalam suatu lingkungan masyarakat menjadi sangat dimanis dan harmonis, baik dalam hubungan rumah tangga, antar tetangga, maupun antar lingkungan masyarakat, maka tidaklah salah apabila ulama disebut juga pemimpin (imam) yang senantiasa menuntun umatnya menuju jalan yang lurus.¹⁰³

Di dalam masyarakat Islam, ulama merupakan salah satu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat. Kyai menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat karena ketokohnya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Lebih dari itu, secara teologis ia juga dipandang sebagai sosok pewaris para Nabi (*waratsat al-anbiya*). Oleh karena itu, perbincangan seputar peran sosial politik Kyai dalam sosial politik yang tumbuh dan berkembang khususnya pada masyarakat Indonesia, akan selalu melibatkan persinggungan wacana antara agama dan politik.

Selain berperan dalam struktur sosial politik, peran yang lebih menonjol juga adalah peran Kyai pada dunia pendidikan khususnya pendidikan Islam. Maka dalam berbagai literatur diketahui keadaan ulama, yaitu :

1. Walaupun tetap menggunakan pemikiran agama Islam dengan corak pemikiran abad pertengahan, namun ulama terbukti melakukan sejumlah

¹⁰³ Zulkifli, *Ulama Sumatera Selatan: Pemikiran dan Peranannya Dalam Lintasan Sejarah*, h. 77-79

pemikiran ulang demi kepentingan kondisi sosial yang dihadapinya. Apa yang digariskan ulama abad pertengahan, tidak diterima begitu saja, tetapi ditafsir ulang sesuai dengan kepentingan kondisi sosial yang dihadapinya. Tafsir yang dilakukan ulama memang tidak merupakan kritik pada esensi yang ditawarkan ulama abad pertengahan, tidak juga langsung pada Alqur'an ataupun Hadish, tetapi dengan cara melakukan tafsir sosial dan tekstual melalui metode berpikir *al-Uṣūl al-Fiqh* yang dipinjam dari ulama abad pertengahan. Dengan berdasar pada kaidah *al-Uṣūl al-Fiqh* "*al-Muḥafaḍah 'ala al-qodami al-Ṣalih wa al-Akḥzu bi al-jadīdi al-Aṣlah*", misalnya, para ulama menjadi sangat akomodatif pada perubahan baru yang ditawarkan alam pikiran modern atau alam pikiran yang didominasi tradisi lokal yang ada.

2. Secara umum ulama memusatkan perhatiannya pada dunia pendidikan. Hal ini pada awalnya didasarkan pada prinsip – meminjam istilah Shi'ah, "*taqiyyah*" – yaitu menyembunyikan kekuatan pada saat kondisi tidak memungkinkan untuk berkembang. Strategi *taqiyyah* ini dikemukakan sebagai jawaban atas kondisi politik yang tidak kondusif, namun selanjutnya strategi pemusatan perhatian pada pendidikan ini dijadikan satu-satunya cara yang mereka tempuh. Urusan sosial politik akhirnya cenderung ditelantarkan. Hal ini tercermin salah satunya pada materi yang diajarkan masih terbatas hanya pada materi-materi disekitar ibadah privat dan menafikan – tidak memberikan perhatian serius – urusan ibadah publik

Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat dilihat pengertian ulama dan perannya di masyarakat, yaitu :

Tabel 4.1

Pengertian Ulama dan Perannya

No.	Perspektif	Pengertian	Peran
1	Al-Qur'an	Orang-orang yang dianugrahi untuk memahami nilai-nilai Qur'ani, merenungkan dan menyimpulkan	Menyimpulkan hasil renungan dan kongklusinya atas kejadian yang ada dalam Al-Qura'an kepada masyarakat luas, untuk tidak berbuat lagi seperti yang disinyalir di dalam Al-Qur'an (QS 33-39, QS10-32, QS 31 ayat 6)
2	Al-Hadits	Pewaris nabi, maka dia harus mengikuti nabi. Di antaranya, Nabi tidak pernah keberatan terhadap apapun keputusan Allah di dalam Al-Qur'an sebagai sunnah-Nya	Menyebarkan ilmu agama secara paripurna sebagaimana yang ada dalam nash.
3	Ulama Klasik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ulama adalah orang yang mendalami ilmu dan amaliyahnya yang tertera dalam Al-Qur'an dan hadits. Dengan batasan ini, ahli-ahli ilmu lain yang tidak berhubungan dengan Al-Qur'an dan hadits tidak masuk dalam kategori ulama . 2. Para pengajar, pengahfal Al-Qur'an para pakar dan perawihadist nabawi, para fuqaha, mufti dan apra kadi. 3. "<i>ulamai as-sii</i> (ulama yang buruk), "<i>ulamai as-solothin</i> (ulama penguasa), "<i>ulamai al-fajir</i>" (ulama yang jahat) 	Fokus pada penggiat nilai-nilai keagamaan lewat lembaga pendidikan (madrasah) dan lewat dakwah.
4	Ulama Modern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang memiliki pengetahuan tentang ilmu ke-alam-an dan ilmu agama, dan pengetahuan yang dimilikinya itu 	Dakwah transformatif, luwes dan bisa masuk dalam aktivitas apapun ada di wilyah manapun sesuai dengan keahlian

		<p>dipergunakan untuk mengantarkannya pada rasa khasah (takut atau tunduk) kepada Allah SWT.</p> <p>2. Ustadz, para imam, khatib Jum'at para pakar ilmu tafsir, pakar hadist, sejarah falsafah dan teologi atau mereka yang meluangkan waktunya menuntut ilmu agama (Islam) di sekolah pondok, pesantren atau institusi pengajian tinggi dan berhasil memahami secara mendalam dari pada ilmu tafsir, hadist, sastra Arab, sejarah, fiqh, falsafah, teologi.</p> <p>3. Tidak sebatas dilekatkan pada diri seseorang yang memahami tetnang fiqh, tauhid, tasawuf, dan akhlaq saja melainkan orang yang mengetahui dan memahami tentang segala hal yang terkait dengan objek yang dikaji. Jika demikian penggunaan arti ulama, maka ulama bisa dilekatkan pada berbagai orang yang mendalami ilmu tentang apa saja, termasuk misalnya ilmu kedokteran, ekonomi, sains, teknik dan bahkan juga seni budaya</p>	<p>yang dimiliki dan tetap berpegang pada nilai dakwah (<i>amar ma'ruf, nahi munkar</i>) dan dapat menjadi suri tauladan di wilayah apapun yang dijalani dalam kehidupan ini.</p>
--	--	---	---

Sumber :olah data 2019

Peran dan ajaran para kyai yang hidup pada abad pertengahan terus berkembang dan menjadi sentral sebagai ulama yang memiliki berbagai ilmu pengetahuan yang luas di berbagai bidang, seperti pemerintahan, politik dan tentu saja ilmu keagamaan. Pada abad ke-19 perkembangan Islam di Palembang belum berjalan dengan baik dan pesat, hal ini dikarenakan pada masa tersebut belum banyak tokoh-tokoh ulama yang memiliki peranan dalam penyebaran agama Islam

di Palembang. Masih banyak masyarakat Palembang pada masa itu belum memahami dan mengerti mengenai ajaran Islam yang terkandung dalam Alqur'an dan Hadith.

Disisi lain dari berbagai laporan pejabat Belanda abad ke-19, ditemukan keterangan bahwa penduduk Palembang masih *heidensch* (belum beragama, maksudnya masih menganut agama Hindu dan Animisme). Laporan lainnya memberitakan penduduk Palembang masih kurang taat beragama. Berita lain mengemukakan bahwa penduduk Mekakau (nama suatu daerah pedalaman) sembahyang mingguan bukan pada hari Jumat melainkan pada hari Rabu dan jika ada orang Islam mati, kepalanya menghadap ke Timur bukan ke Barat seperti lazimnya.¹⁰⁴ Disinilah dibutuhkan seorang ulama yang benar-benar mampu mengajarkan syariat-syariat Islam kepada masyarakat secara benar dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Secara historis-sosiologis, ulama¹⁰⁵ Sumatera Selatan memiliki multifungsi dengan kepemimpinan polimorfik. Otoritas ulama¹⁰⁶ Sumatera Selatan sangat

¹⁰⁴ Husni Rahim, *System Otoritas & Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, h. 54

¹⁰⁵ Secara etimologi, 'ulama : berasal dari kosa kata Arab, yaitu العلماء bentuk jamak dari kata (عالم 'alim), yang berarti ilmuwan, peneliti, orang yang mengetahui hakikat ilmu alam atau ilmu syari'ah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa ulama adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menganalisa alam semesta dan fenomenanya untuk kepentingan hidup dunia dan akherat serta takut kepada Allah jika terjerumus ke dalam kenistaan. Lihat: H. Jufri Suyuti Pulungan, *Peran 'Ulama dan Umara' dalam Membangun Sumatera Selatan Berbasis Religius, dalam Komunikasi Umara-Ulama*, (Palembang: 2005), h. 51. Lihat Juga: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 1098.

¹⁰⁶ Dalam Alqur'an, kata 'ulama : العلماء disebutkan sebanyak dua kali. Pertama, Q.S. 35: 28 menjelaskan 'ulama adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menganalisa ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah atau alam semesta dan fenomenanya dan takut kepada Allah. Kedua, Q.S. 26: 197 menjelaskan ulama adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menganalisa ayat-ayat Allah yang bersifat Qur'aniyah atau ahli dalam pengetahuan agama Islam. Ulama adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menganalisa ayat-ayat Allah yang

luas, yaitu sebagai tokoh agama dan *problem solver* dalam bidang politik, sosial, budaya, dan agama.¹⁰⁷ Karena itu, masyarakat mengasumsikan ulama sebagai pengayom ilmu agama, orang yang menguasai ilmu agama, penghubung antara negara dengan rakyat, dan da'i yang dapat mengubah perilaku beragama masyarakat.¹⁰⁸

Ulama Sumatera Selatan menempati kedudukan sosial yang tinggi dalam masyarakat muslim Sumatera Selatan. Mereka tidak hanya sekedar dihormati dan disegani, akan tetapi pemikiran mereka dalam berbagai dimensi diapresiasi sebagai kebenaran, dipegang dan diikuti secara ketat dan mengikat. Artinya, secara teologis dan sosiologis-historis, ulama Sumatera Selatan merupakan kelompok elit keagamaan yang sangat signifikan. Mereka merupakan figur sentral dalam perkembangan kehidupan religiokultural dan percaturan sosiopolitik.

Sebagai figur sentral, pemikiran ulama Sumatera Selatan abad XX sangat mempengaruhi pemikiran banyak orang dan membentuk kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Disamping itu, pemikiran mereka juga membawa kemajuan terhadap peradaban Sumatera Selatan. Sebab, mereka adalah figur yang menentukan peradaban, budaya, dan kebudayaan.¹⁰⁹ Demikian sebaliknya, mereka ditentukan oleh budaya, kebudayaan, dan peradaban.¹¹⁰

bersifat Qur'aniyah maupun kauniyah dan bertaqwa (takut dan tunduk) kepada Allah. Lihat: M. Quraish Shihab, *Membumikan Alqur'an*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 382.

¹⁰⁷ Maryam, "*Pergeseran Peran Ulama dalam Perubahan Sosial di Kota Palembang*", Tesis,

¹⁰⁸ Azhari Ali, "*Definisi Ulama dan Peranannya dalam Pandangan Masyarakat Palembang Era Kontemporer*", Tesis,

¹⁰⁹ Peradaban (Arab: *thaqafah* dan Inggris: *civilization*), budaya, dan kebudayaan (Arab: *tamaddun* dan Inggris: *culture*) adalah term yang memiliki perbedaan. Peradaban berarti "kemajuan (*hadarah*) dan kecerdasan yang ada pada suatu masyarakat atau bangsa". Kebudayaan adalah segala hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Kebudayaan lebih luas daripada peradaban. Sebab, peradaban terbatas pada aspek yang bersifat lahiriyah *an sich* atau kemajuan dalam bidang

Ulama Sumatera Selatan abad XX adalah aktor peradaban yang berperan dalam sebaran dan pasang surut peradaban Islam di Sumatera Selatan. Mereka sangat berperan dalam dinamika peradaban Islam, sebagaimana tesis Toynbee. Menurutnya, peran agama dan spiritualitas sangat signifikan terhadap dinamika peradaban. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa peradaban yang telah hilang spiritualitasnya akan mengalami penurunan.¹¹¹

Ulama Sumatera Selatan abad XX menjadikan Islam sebagai spiritualitas peradaban, sehingga peradaban di Sumatera Selatan pada abad XX dinamis. Fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa dinamika peradaban Sumatera Selatan pada abad XX dipengaruhi oleh pemikiran ulama Sumatera Selatan. Mereka aktif merespon berbagai problemproblem yang muncul pada abad XX. Problemproblem tersebut meliputi problem keagamaan, politik, sosial, hukum, keadilan, ideologi, konflik elit Islam.¹¹²

Masing-masing corak pemikiran memiliki pendukung, landasan berpikir, dan pengaruh terhadap peradaban Sumatera Selatan hingga saat ini. Menurut Harun

materi, sedangkan kebudayaan meliputi perdaban yang bersifat lahiriyah dan perkembangan akal yang bersifat bathiniyah. Kebudayaan meliputi keseluruhan kebudyayaan mulai dari yang masih primitif, sedang berkembang, dan sudah maju atau modern. Sedangkan peradaban hanya terbatas pada kebudayaan yang sudah maju atau modern *an sich*. Menurut C. Kluchohn dan Koentjaraningrat, unsur-unsur kebudayaan terdiri dari sistem religi dan upacara keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian, sistem teknologi dan peralatan, sistem bahasa, dan sistem kesenian. Koentjaraningrat menyebutkan tiga wujud kebudayaan yaitu ide-ide/gagasan/nilai-nilai/norma-norma/peraturan, aktivitas perilaku, dan benda-benda hasil karya manusia. Lihat: h. J. Suyuthi Pulungan, *Sejarah Peradaban Islam*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2009), h. 8-12, 16-17.

¹¹⁰ Peter L. Berger & Thomas Luckmann menjelaskan proses tersebut dengan tiga prinsip, yaitu kebudayaan dibentuk oleh manusia, manusia dibentuk oleh kebudayaan, kebudayaan menjalani hidup sendiri. Lihat: George Ritzer dan Barry Smart (ed.), *Handbook of Social Theory*, Terj. Imam Muttaqin (et.al.), (Bandung: Nusa Media, 2012), h. 440-445. Lihat Juga: George Ritzer, *Modern Sociological Theory*, Terj. Triwibowo B.S., (Jakarta: Kencana, 2014), h. 61, 396.

¹¹¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 113.

¹¹² Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, h. 158-172.

Nasution, corak pemikiran teologi Islam sangat berpengaruh terhadap peradaban. Corak pemikiran teologi rasional mempengaruhi munculnya peradaban yang tinggi sebagaimana umat Islam zaman klasik. Sebaliknya, corak teologi tradisional menyebabkan umat Islam Zaman Pertengahan stagnan dalam berbagai aspek.¹¹³

Salah seorang ulama Sumatera Selatan yang cukup terkenal yang hidup antara abad ke-19 dan abad ke-20 adalah K.H. Abubakar Bastari (1898 -1971). Beliau adalah seorang ulama yang berasal dari daerah pinggiran Sungai Komerling, pedalaman Martapura di Desa Kota Negara, Ogan Komerling Ulu (OKU) Sumatera Selatan. K.H. Abu Bakarbastari merupakan salah satu tokoh ulama besar di Sumatera Selatan.

Pada abad ke-20 gejolak pembaharuan di Sumatera Selatan teramat nyata antara *kaum tuo* dan *kaum mudo*, dalam hal ritula ibadah seperti, sholat subuh pakai kunut atau tidak, talkin pada mayyit ketika pemakaman, masalah tahlil dan lain-lain. Gejolak faham pembaharuan ini menyebabkan kegaduhan di masyarakat Palembang, maka para ulama yang tergabung pada ulama konserpativ (ulama tradisional) yang faham syafi'iyah membentuk suatu perkumpulan yang di beri nama Majelis Ulama Pertimbangan Igama Islam Palembang di singkat MUIII Palembang, yang di ketuai oleh Ki. Kemas. H. Abdullah Azhari (Ki. Pedatuan) dan K.H. Abubakar Bastari sebagai wakil ketua MUIII Palembang. Perkumpulan ini sebagai wadah dialog antara *kaum tuo* dan *kaum mudo* sebagai penengah

¹¹³ Harun Nasution, *Islam Rasional*, h. 112-116. Lihat Juga: Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 42-57.

ketika terjadi selisih pendapat perihal ritual keagamaan dalam hal ibadah amaliyah di kalangan masyarakat Palembang.

Gambar 4.1

K.H. Abubakar Bastari menjabat sebagai Wakil MUPII



MUPII (Majelis Ulama Pertimbangan Igama Islam) Palembang. Fungsinya adalah sebagai wadah dialog antara *kaum tuo* dan *kaum mudo* dalam hal-hal perbedaan pandangan pada urusan ritual ibadah keagamaan pada masa itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti mencari kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi langsung informan yang merupakan zuriatnya, yaitu anak kandung beliau yang bernama Drs. H.M. Lukman Hakim, M. H, yang merupakan anak ke-9 dari K.H. Abu Bakarbastari. Hasil wawancara pada hari Jum'at/21 Juni 2019 yang berhasil kami himpun penjelasannya mengenai peran beliau terhadap perkembangan Islam di Palembang, yaitu:

“Bahwa benar K.H. Abu Bakar Bastari adalah ayahandanya, dan menjelaskan bahwa :

1. K.H. Abu Bakar Bastari pernah menjadi penggagas sekaligus perintis berdirinya perguruan tinggi Sumatera yang merupakan cikal bakal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah yang sekarang berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah.
2. Selain itu ayahanda kami juga merupakan penggagas dan pelopor berdirinya Pengadilan Tinggi Agama di Sumatera Selatan, khususnya Palembang yang sekarang gedung berada di KM 3,5 di depan jalan UIN Raden Fatah Palembang.
3. Peran ayahanda kami yang tak kalah penting dalam penyebaran agama Islam di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang adalah peran beliau sebagai ulama besar pada masa beliau hidup, yang lebih banyak menghabiskan waktunya mengajar di masjid Suro 30 Ilir, di Masjid Agung, di sekolah Madrasah Nurul Falah, di Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Sumsel yang sekarang menjadi UIN Raden Fatah, serta masih banyak lagi tempat-tempat beliau mengajar agama.
4. K.H. Abu Bakar Bastari adalah pendiri dan direktur utama Madrasah Nurul Falah yang ada di 30 Ilir. Madrasah ini asih tetap eksis/masih ada sampikn sekarang. Walaupun sekarang dikelola bkan lagi oleh zuriatnya atau keturunan K.H. Abu Bakar Bastari, namun sekarang dikelola oleh salah satu donatur tetap Madrasah Nurul Falah. Masih menurut Bapak Lukmanul Hakim, karena kesibukan kami sebagai anak-anak K.H. Abu Bakar Bastari memiliki berbagai kesibukan di bidang pekerjaan kami masing-masing, seperti saya saja comtohnya saya bertugas sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama di Palembang hingga saat ini, maka kami tidak dapat mengelola sekolah Madrasah Nurul Falah sebagaimana seharusnya. Maka dari itu kami sepakat agaar Madrasah Nurul Falah tetap berdiri hingga saat ini yang merupakan peninggalan monumental ayahanda kami, diserahkan kepengurusan sekolah Madrasah Nurul Falah kepada salah satu donatur tetap yayasan.”¹¹⁴

Masih menurut Bapak Drs. H.M. Lukmanul Hakim, ada semacam cerita mistis yang beliau dengar cerita dari salah seorang teman ayahandanya, ketika itu beliau masih kecil, bahwa :

‘Bahwa K.H. Abu Bakar Bastari pernah suatu ketika berangkat dari Palembang ke Jakarta untuk tujuan perkmpulan alim ulama. Saat naik pesawat dan pesawat akan landing terjadi kerusakan mesin pesawat mati. Maka teman K.H. Abu Bakar Bastari, berkata “wahai buya (panggilan K.H. Abu Bakar Basari) pesawat mesinnya mati, bagaimana ini, bisa tidak selamat ini ? Maka Buya berkata : “tenang, bacalah doa sebanyak-banyaknya insyaallah kita akan selamat”. Maka alhamdulillah, dan konon

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. H.M. Lukmanul Hakim pada hari Jum’at, 21 Juni 2019 pukul 0400 – 05.30

ceritanya bahwa pesawat landing di abdnara dalam keadaan mesin amti, namun mendarat dengan sempurna. Wallahu'alam bisawaf, itu adalah cerita teman ayahanda saya ketika saya mash kecil".¹¹⁵

Informan selanjutnya yang berhasil peneliti temui adalah anak ke-15 dari K.H. Abubakar Bastari, yaitu Bapak M. Imam Zarkasyi, SH yang bekerja di Partai Perindo Sumatera Selatan dan sampai saat ini mendiami rumah peninggalan ayahandanya. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Imam Zarkasyi tentang kisah wafatnya K.H. Abubakar Bastari, dijelaskannya :

“Buya (panggilan K.H Abubakar Bastari) meninggal pada malam Jumat sekitar pukul 02.30 Wib, dalam keadaan duduk berdzikir memegang tasbih dan Buya berwasiat pada istrinya bahwa ada cincin yang selalu dipakainya untuk diberikan kepada anaknya yang bungsu yaitu bapak Imam Zarkasyi masa kecil sekitar umur 5 atau 6 tahun, dan cincin itu masih ada sampai saat ini. Selain itu ada kisah karomah kitab-kitab K.H. Abubakar Basari. Suatu ketika terjadi kebakaran besar di sekeliling rumah K.H Abu Bakar Bastari di Jalan Talang Kerangga 30 Ilir. Semua rumah terbakar kecuali rumah K.H. Abubakar Bastari dan saat kebakaran itu K.H. Abubakar Bastari sedang mengajar di luar kota di Bangka. Maka setelah beliau pulang dan melihat semua rumah warga sekeliling habis terbakar. Maka kata istrinya (panggilannya Umi), berkata “Buya rumah warga kebakaran, tapi Alhamdulillah rumah kita tidak kena kebakaran”. Buya menjawab “selama masih ada kitab-kitab di dalam rumah ini (sambil menunjuk kitab-kitab beliau di lemari kitab), maka insyaallah tidak akan terkena banjir, kebakaran dan hal lainnya. Peristiwa lainnya pernah rumah K.H. Abubakar Bastari dimasuki maling, tapi maling itu justru berputar-putar di dalam rumah sampai pagi, tidak bisa keluar. Selain itu K.H. Abubakar Bastari memiliki murid yang merupakan alumni Nurul Falah, yaitu : K.H. Malik Tajudin, K.H. Madcik Rosyad, K.H. Assiddiqi, K.H. Cek Ming, dan masih ada yang lainnya mereka semua menjadi ulama hebat di Palembang”.¹¹⁶

Untuk mengetahui beberapa data mengenai peran serta K.H. Abubakar Bastari dalam penyebaran Islam di Palembang, maka zuriyat beliau, yaitu Bapak Imam Zarkasyi memperlihatkan kitab-kitab lama yang merupakan peninggalan K.H. Abubakar Bastari yang masih tersimpan sebanyak dua lemari buku dirumah

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Imam Zarkasyi, SH pada hari Jum'at, 22 Juni 2019

beliau yang saat ini ditempati oleh anak bungsu beliau, keadaannya sangat memprihatinkan. Kemudian data otentik lainnya yaitu semacam sertifikat penghargaan dari kerajaan Syarif Husein atau semacam ijazah pengakuan hasil tes mengajar di Mekkah. Karena K.H. Abubakar Bastari adalah salah satu ulama yang diterima jadi pengajar di Mekkah, dan dari 60 ulama yang ikut tes, K.H. Abubakar Bastari terpilih terbaik ke-2. Dalam surat itu ditandatangani oleh 4 golongan ulam madzhab, yaitu Hanifah, Malikiah, Syari'an dan Hambali, dan K.H. Abu Bakar Bastari adalah ulama Muladzimin dari Indonesia yang mengajar di Mekkah.

Gambar 4.2
Hasil Tes Mengajar di Mekkah – K.H. Abu Bakar Bastari



Sumber : Zuriyat K.H. Abu Bakar Bastari – Imam Zarkasyi

Selain itu data yang didapat peneliti adalah mengenai urutan ulama besar Sumatera Selatan dengan peninggalahn monumental dan karyanya sebanyak 101 ulama, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Daftar Ulama Besar Sumsel

No. Urut	Nama Ulama Besar Sumsel
001	Sunan Candi Walang
002	Sunan Kebon Gede
003	Sunan Lembang
004	Sunan Ternate
005	Tuan Tanjung Idrus Salam
006	Tuan Umar Baginda Saleh
007	Puyang Luke
008	Sayyid Mustafa Assegaf
009	Faqih Jalaluddin
010	Ki Jaya Laksana
011	Buyut Feqeh
012	Syekh Abdus Shamad Al-Palimbani
013	Syekh Syihabuddin Al-Jawi Al-Palimbani
014	Syekh Muhammad Muhyiddin Al-Palimbani
015	Kemas Fakhruddin
016	Syekh Kemas Ahmad bin Abdullah
017	Kironggo Wiro Santika
018	Sayyid Abdurrahman Maula Taqoh
019	Datuk Muhammad Zen
020	Datuk Muhammad Akib
021	Kemas HM. Said
022	Kemas Muhammad bin Ahmad
023	Pangeran Kramo Jayo
024	Sayyid Muhammad Arif Jamalullail
025	Sayyid Hasyir Jamalullail
026	Syekh Abdullah bin Ma'ruf
027	Pangeran Syarif Ali BSA
028	Ki Ranga Satca Nandita
029	Sayyid Ahmad Jamalullail
030	Pangeran Penghulu Nata Agama Akil
031	Pengeran Penghulu Nata Agama Fakhruddin
032	Pangeran Penghulu Nata Agama Muhammad Akib
033	Pengeran Surya Kusuma Alim Muhammad Arsyad
034	Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi
035	Habib Ibrahim bin Yahya

036	Habib Alwi bin Ahmad Alkaf
037	Khatib Muhammad Jamalullail
038	Syech Muhammad Azhari bin Abdullah
039	Habib Abdurrahman Al-Munawwar
040	Kiagus H.A. Malik Imam
041	Pangeran Penghulu Nata Agama Mustafa
042	Masagus Marogan (Ki Marogan)
043	Ki Delamat
044	Sayyid Bakri Jamalullail
045	Sayyid Junaid Jamalullail
046	Hoofd Pengulu Abdurrahman
047	Kiagus Ahmad
048	Syekh Kemas Muhammad Azhari
049	Ki Pedatuan
050	Kemas H. Abdullah Umar
051	Hoofd Penghulu Kiagus Muhammad Yusuf
052	Kiagus H. Muhammad Azhari Imam
053	Ki Kemas H. Umar
054	Ki Kemas H.A. Roni Azhari
055	Hoofd Penghulu Kiagus H. Nang Thoyib
056	<i>K.H. Abu Bakar Bastari</i>
057	Sayyid Muhsin Al-Musawwa
058	Ki Kemas H. Muhammad Yunus Al-Hafizh
059	K.H.A. Rasyid Shiddiq Al-Hafizh
060	Ki Kemas H. Ismail Umary
061	Ki Kiagus H. Muhammad Sjadjari
062	Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri
063	Ki Kemas H.M. Zen Mukti
064	Tuan Haji Husain
065	K.H. Mallawie Husein
066	H. Ahmad Khatib Penghulu
067	Sayyid Salim Jamalullail
068	Kemas Hasan Umary
069	K.H. Anwar Kumpul
070	Habib Abdullah bin idrus Shahab
071	Habib Ali Jenggot Abang
072	K.H. Ahmad Azhary
073	Habib Abdullah Al-Madihij
074	K.H. Hasan Kolai
075	Ki Masagus H. Husin Abu Manshur
076	Kiagus H. Abdul Hamid Imam
078	Kiai Cek Kuyung
079	Kiai Cek Ning
080	Kemas Muhammad Dahlan Umary

081	Drs. K.H. Husin Abdul Muin
082	Ki R.H. Ahmad
083	Muallim Nang
084	K.H. Daud Rusydi
085	K.H. Nang Tjik Al-Karmani
086	Kiagus Ishak Imam
087	Kiagus H. Mat tjik Rosyad
088	K.H. Abu Nawar
089	K.H. Abdurrahman Zubair
090	Habib Muhammad Syekh Abu bakar
091	Ki Matcik Akhir
092	K.H.A. Malik Tadjuddin
093	K.H.A. Sjazili Moesthofa
094	Prof. Dr. K.H.O Gadjahnata
095	K.H. Muhammad Zen Syukri
096	Drs. Kemas A. Rahman Ismail
097	Kemas H. Ibrahim Umary
098	K.H. Muslim Anshori, BA
099	Drg. H. Muhammad Syamsu Assegaf
100	Kemas H. Muhammad Salim Umary
101	K.H. Ali Umar Thayyib

Sumber : Olah Data 2019

Berdasarkan data tersebut di atas, K.H. Abu Bakar Bastari berada pada urutan yang ke-56 dan ini adalah sebagai bukti bahwa beliau secara hakikat setingkat Mufti (Guru Besar) mendekati kewalian dalam penyebaran agama Islam di Palembang pada masa beliau hidup.

B. Kiprah dan Pengabdian di Bidang Sosial

Seorang ulama tidak hanya memiliki peran dan tugas sebagai orang yang ahli dalam bidang agama yang menyebarkan serta mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat sesuai dengan syariat Islam, namun juga adalah orang yang berfungsi sebagai guru dan pendidik yang memberikan pengajaran kepada masyarakat yang dituangkan dalam pendidikan formal (berupa lembaga

pendidikan) maupun non formal (seperti pengajian di mushola, langgar maupun surau).

Oleh karena ilmu dan otoritas yang dimilikinya, maka ulama menempati posisi sebagai elit sosial dalam sistem masyarakat Islam.¹¹⁷ Sebagai elit sosial, ulama memiliki fungsi yang luas tidak terbatas pada wilayah keagamaan saja, tetapi juga pada bidang-bidang lainnya. Ulama, dengan demikian, bukan saja sebagai kelompok ahli hukum Islam yang secara tradisional berfungsi sebagai muballig, guru, tetapi juga tempat bertanya umat Islam dalam menghadapi berbagai masalah.¹¹⁸

Fungsi dan gagasan mereka dalam pengembangan pendidikan Islam dan khazanah keagamaan yang mereka hasilkan. Ulama di sini dilihat sebagai ahli agama Islam yang menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai persoalan keagamaan atau seseorang yang oleh masyarakat Fungsi ulama dimaksudkan sebagai status mereka dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sedangkan peran ulama adalah aktivitas yang dilakukan ulama sebagai akibat dari fungsi tersebut.

Pendidikan Islam diartikan sebagai jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Secara kelembagaan

¹¹⁷ Lapidus, I.M. *A History of Islamic Societies*. Cambridge University Press, Cambridge. 1989.

¹¹⁸ Horikoshi, H. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Jakarta. 1987

pendidikan Islam disini adalah pesantren atau madrasah, atau perguruan tinggi bercirikan Islam.

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam terpenting di Indonesia. Keberadaannya begitu penting dalam menciptakan kader-kader bangsa yang berwawasan keislaman. Salah satu kelebihan yang dimiliki madrasah adalah adanya integrasi ilmu umum dan ilmu agama. Madrasah juga merupakan bagian penting dari lembaga pendidikan nasional di Indonesia. Peranannya begitu besar dalam menghasilkan generasi penerus bangsa. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan ini tidak didapatkan dengan mudah. Eksistensi dalam sejarah perjalanannya kurang diperhatikan bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum. Madrasah seolah hanya menjadi pelengkap keberadaan lembaga pendidikan nasional.

Dalam pendidikan Islam di Palembang dan Sumatera Selatan, K.H. Abu Bakar Bastari memberikan kontribusi yang cukup besar dengan memelopori berdirinya sekolah madrasah setingkat Tsnowiyah pada masa sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1926 yang diberi nama Madrasah Nurul Falah yang terletak di daerah 30 Ilir dan beliau sendiri yang menjadi Direktur dari sekolah yang didirikan tersebut. Sekolah Madrasah Nurul Falah pada masa itu berkembang pesat dan banyak muridnya yang datang dari luar Palembang untuk menuntut ilmu di Madrasah Nurul Falah. Selain berperan terhadap pendirian sekolah madrasah di Palembang, K.H. Abu Bakar Bastari juga merupakan salah satu pendiri Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan pada tahun 1957 yang merupakan cikal bakal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah.

Pada bagian ini ulama banyak menyoroti posisi dan kondisi madrasah sebagai model pendidikan Islam di Indonesia. Mereka melihat madrasah sebagai tumpuan harapan dalam upaya pencerdasan kehidupan umat Islam. Madrasah menjadi alternatif bagi model pendidikan yang dipandang dikotomis antara model pesantren di satu pihak dan pendidikan umum (sekuler) di pihak lain. Madrasah merupakan penggabungan keduanya. Dalam bahasa ulama, madrasah adalah model yang ideal, karena dapat menjalankan keseimbangan *dunia dan akhirat*. Sebenarnya madrasah diarahkan pada pencapaian pendidikan yang integralistik.

1. Asal-Usul Madrasah

Kendati fenomena madrasah di dunia Islam telah muncul sekitar abad ke-4/5 H (10/11 M), seperti munculnya madrasah-madrasah di Naisaphur Iran (\pm 400 H) dan Madrasah Nidzamiyah di Baghdad (457 H),¹¹⁹ keberadaan madrasah di Indonesia baru dijumpai pada awal abad 20. Dengan demikian, kemunculan madrasah di tanah air tidak memiliki hubungan langsung dengan keberadaan madrasah di era klasik. Beberapa penulis sejarah pendidikan Islam di Indonesia

¹¹⁹ Sejarawan pendidikan Islam seperti Munirudin Ahmed, George Makdisi, Ahmad Syalabi, dan Michael Stanton berpendapat bahwa madrasah yang pertama kali muncul adalah madrasah Nidzamiyah yang didirikan Wazir Nidzam al-Mulk sekitar tahun 457 H/1064 M. Namun, penelitian lebih akhir menyebutkan bahwa madrasah di Naisaphur justru muncul lebih awal—sekitar tahun 400 H/1009 M—jauh sebelum madrasah Nidzamiyah. Pendapat kedua ini dianut oleh Richard Bulliet, Naji Ma'ruf, dan al-'Al. Baca lebih lanjut; Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru* (Jakarta : Logos, 1999), hlm. vii-viii. Tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan madrasah di era klasik, baca lebih lanjut dalam; Ahmad Syalabi, *Sedjarah Pendidikan Islam*, terj. Muchtar Jahja dan Sanusi Latief (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hlm. 109-112 ; George Makdisi, *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and The West* (Edinburg : Edinburg University Press, 1981), hlm. 51-52 ; Hasan Asari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam; Kajian atas Lembaga-Lembaga Pendidikan* (Bandung : Mizan, 1994), h. 44- 81.

menyebut dua peristiwa penting yang melatarbelakangi munculnya madrasah di Indonesia, yaitu *kolonialisme Belanda* dan *gerakan pembaharuan Islam*.¹²⁰

Selama menjajah Indonesia, pemerintah Hindia Belanda menunjukkan sikap diskriminatif terhadap umat Islam. Misalnya, pemerintah membuat aturan sebagaimana tertuang dalam pasal 179 (2) Konstitusi Hindia-Belanda (*Indische Staatsregeling*)—yang melarang pendidikan agama diajarkan di sekolah umum milik pemerintah dengan alasan pemerintah bersikap *netral*.¹²¹ Dalam praktik, aturan tersebut tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Pemerintah Hindia-Belanda lebih berpihak pada agama Kristen. Sekolah-sekolah Kristen didirikan di setiap karesidenan dan dianggap sebagai sekolah pemerintah serta mendapat subsidi rutin. Dakwah Islam di daerah animisme dilarang sedangkan misi Kristen dibiarkan. Pemerintah Belanda juga membiarkan upaya penghinaan terhadap Islam, dan melarang hal yang sama terhadap Kristen.¹²²

Kebijakan diskriminatif pemerintah Hindia Belanda memunculkan reaksi umat Islam, baik secara *defensif* maupun *progresif*.¹²³ Reaksi *defensif* ditunjukkan, terutama oleh ulama tradisional, dengan cara menghindari sejauh mungkin pengaruh politik Belanda terhadap system pendidikan Islam. Sikap ini terlihat pada sistem pendidikan tradisional pesantren yang mengambil tempat di daerah-

¹²⁰ Baca lebih lanjut dalam: Maksum, *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*, h. 81-82 ; Azra, *Pendidikan Islam*, hlm. 36-38; 97-102 ; Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2001), h. 63-64 ; Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen* (Jakarta : LP3ES, 1994), h. 26-29 ; Abdurahman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi* (Yogyakarta : Kalam Mulia, 2005), h. 188-189.

¹²¹ Daulay, *Historisitas dan Eksistensi*, h. 49.

¹²² Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta : LP3ES, 1988), h. 186-188 dan 333 ;

¹²³ Maksum, *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*, h. 116-117.

daerah pedalaman untuk menjauh/menghindar dari pengaruh dan pantauan Belanda. Di tempat ini para kyai lebih leluasa mendidik para santrinya untuk mendalami agama sekaligus mendidik mereka sebagai kader yang siap berjihadmelawan penjajah. Melalui cara *defensif*, pesantren di satu sisi memang berhasil menjauh dari intervensi Belanda, tapi di sisi lain pesantren menjadi terasing dari perkembangan masyarakat sehingga agak terlambat melakukan pembaharuan. Mengomentari pendekatan *defensif* ini, Nurcholish Madjid mengatakan, “seandainya kita tidak pernah dijajah, pesantren-pesantren itu tidaklah begitu jauh terpencil di daerah pedesaan seperti kebanyakan pesantren sekarang ini, melainkan akan berada di kota-kota pusat kekuasaan atau ekonomi, atau sekurang-kurangnya tidak terlalu jauh dari sana”.¹²⁴

Reaksi *progresif* dilakukan dengan pertimbangan bahwa dominasi Hindia Belanda dengan pola pendidikan modern yang sekuler harus dilawan dengan pendirian lembaga-lembaga modern *ala* mereka tapi berbasis Islam. Dengan demikian, cara *progresif* ini dilakukan umat Islam dengan cara “menolak sambil meniru”. Reaksi *progresif* ini terutama dipelopori sejumlah ulama pembaharu, yaitu mereka yang mulai bersentuhan dengan gerakan pembaharuan yang telah menggema di Timur Tengah sejak awal abad ke 19. Maka, melalui pola moderat ini, berdirilah sejumlah madrasah dan sekolah umum berciri khas Islam dengan beberapa corak;¹²⁵ *Pertama*, pendirian madrasah dengan dominasi mata pelajaran agama ditambah mata pelajaran umum (madrasah plus), sebagaimana dilakukan

¹²⁴ Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 4

¹²⁵ Maksum, *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*, h. 106 ; Lihat juga Azra, *Pendidikan Islam*, h. 36-38.

Madrasah Adabiyah Padang Panjang (1909). *Kedua*, pendirian sekolah umum model Belanda ditambah mata pelajaran agama (sekolah plus), seperti yang ditawarkan Sekolah Adabiyah Padang (1915). *Ketiga*, pendirian madrasah dengan bidang kajian sepenuhnya agama (madrasah *diniyah*) yang dikelola secara modern, sebagaimana ditawarkan Madrasah Sumatera Thawalib (1919). Dalam perkembangan berikutnya, pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam modern dilakukan secara massif oleh umat Islam di berbagai penjuru tanah air.

2. Madrasah di Awal Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, segera dilakukan upaya-upaya pembaharuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat)¹²⁶ dalam sidangnya tanggal 29 Desember 1945 membuat sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, yang intinya agar secepat mungkin mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran yang dijalankan sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran baru. Dalam rekomendasi itu juga disinggung tentang keberadaan madrasah dan pesantren, yakni: “Madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia

¹²⁶ BP KNIP dibentuk tanggal 22 Agustus 1945 oleh PPKI [Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia] dan dilantik tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru Jakarta dengan Ketua Kasman Singodimedjo. Berdasar maklumat Wakil Presiden Nomor X [16 Oktober 1945] KNIP, sebelum terbentuk MPR dan DPR, disertai tugas legislatif. Dalam melaksanakan tugas KNIP sehari-hari, dibentuk Badan Pekerja KNIP yang keanggotaannya dipilih dari anggota KNIP yang ada. BP KNIP bertanggungjawab kepada KNIP. Ketua Harian KNIP adalah St. Sjahrir. Baca dalam *Ensiklopedi Nasional Indonesia 3* (Jakarta: Delta Pamungkas, 1997), h. 28-30.

umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata dengan berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. ”¹²⁷

Sebagai respon atas rekomendasi BP KNIP tersebut, tanggal 1 Maret 1946 Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (Dr. Mr. T.S.G Mulia) melalui Surat Keputusan Nomor 104/Bhg.O membentuk sebuah komisi khusus dengan nama Panitia Penyelidik Pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan Soegarda Poerbakawatja, dengan tugas;

- (a) Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah;
- (b) Menetapkan bahan pengajaran dengan mempertimbangkan keperluan yang praktis dan jangan terlalu berat;
- (c) Menyiapkan rencana pelajaran untuk tiap jenis sekolah termasuk fakultas.¹²⁸

Dalam laporan yang disusun tanggal 2 Juli 1946, Panitia Penyelidik berhasil merumuskan sejumlah hal penting. Rumusan tujuan pendidikan nasional diarahkan kepada upaya *menanamkan semangat dan jiwa patriotisme*.¹²⁹ Tujuan ini sangat terkait dengan kondisi bangsa Indonesia yang baru saja merdeka, sehingga diperlukan upaya penanaman semangat patriotisme dan peningkatan kesadaran nasional dalam rangka mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Tentang Pendidikan Agama, Panitia Penyelidik merekomendasikan hal-hal berikut;

- (a) Pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah,
- (b) Para guru dibayar oleh pemerintah,

¹²⁷ Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 32-33.

¹²⁸ *Ibid.*, h. 34.

¹²⁹ *Ibid.*, h. 35.

- (c) Pada Sekolah Dasar, pendidikan agama diberikan mulai kelas IV,
- (d) Pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu,
- (e) Para guru agama diangkat oleh Departemen Agama,
- (f) Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum,
- (g) Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama,
- (h) Diadakan latihan bagi para guru agama,
- (i) Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki, dan
- (j) Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.¹³⁰

Dari sekian rekomendasi di atas, perhatian khusus terhadap madrasah hanya pada bagian (i), selebihnya diarahkan pada pendidikan agama di sekolah umum.

3. Madrasah di Bawah Departemen Agama

Untuk mengurus masalah-masalah agama, termasuk urusan pendidikan agama dan keagamaan, pemerintah atas usul BP KNIP¹³¹ membentuk Kementerian Agama melalui Ketetapan Pemerintah Nomor 1/SD/1946, tanggal 3 Januari 1946.¹³² Sejak terbentuknya kementerian ini, segera dilakukan upaya-

¹³⁰ Steenbrink, *Pesantren Sekolah dan Madrasah*, h. 90-91 ; Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 52-53.

¹³¹ Pembentukan Kementerian Agama ini diusulkan pertama kali [kepada BP KNIP pada tanggal 11 Nopember 1946 dan diulang lagi tanggal 25-28 Nopember 1945, oleh KH. Abu Dardiri, K.H. Saleh Su'aedy, dan M. Sukoso Wirjosaputro [semuanya anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas]. Atas dasar usulan tersebut, BP KNIP sepakat membentuk Kementerian Agama. Baca lebih lanjut dalam; Azyumardi Azra, "HM. Rasjidi BA; Pembentukan Kementerian Agama dalam Revolusi", dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam, ed. *Menteri-Menteri Agama RI; Biografi Sosial Politik* (Jakarta: INIS, 1998), h. 5-6.

¹³² Di masa penjajah, pemerintah kolonial juga telah mendirikan lembaga untuk urusan agama, tentu dengan motif berbeda. Pada zaman Belanda, berdiri sebuah kantor urusan agama dengan nama *Kantoor voor Inlandshe Zaken*. Sedangkan di zaman Jepang kantor urusan agama bernama *Shumuka*, yang berfungsi sebagai penasehat umum dalam masalah agama, antara lain bertugas mengangkat pegawai di bidang agama dan mengawasi buku-buku agama. Pada masa Jepang, kantor ini telah memiliki cabang di seluruh kota karesidenan, walaupun masih berada di bawah naungan Departemen Pendidikan. Nah, kantor inilah yang kemudian menjadi inti Departemen Agama yang berdiri kemudian. Baca lebih lanjut: Steenbrink, *Pesantren Sekolah dan Madrasah*, h. 462-463.

upaya lebih serius untuk memantapkan keberadaan pendidikan Islam, termasuk madrasah. Langkah pertama Kementerian Agama dalam melakukan pembinaan terhadap keberadaan madrasah adalah memberikan bantuan berupa pengadaan sarana dan prasarana serta biaya operasional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1946, tanggal 19 Desember 1946. Dalam peraturan tersebut dijelaskan agar 1/3 dari jumlah jam pelajaran yang digelar. Pengetahuan umum dimaksud meliputi; bahasa Indonesia, membaca dan menulis huruf Latin, berhitung (untuk tingkat dasar). Ditambah dengan ilmu bumi, sejarah, kesehatan tumbuh-tumbuhan dan alam (untuk tingkat lanjutan).

Ketentuan tersebut juga mengatur penjenjangan madrasah yang meliputi:

- (a) Madrasah Tingkat Rendah, dengan lama belajar sekurang-kurangnya 4 tahun, dan siswa dibatasi pada usia 6 sampai 15 tahun; dan
- (b) Madrasah Lanjutan, dengan masa belajar sekurang-kurangnya 3 tahun setelah tamat Madrasah Tingkat Rendah, siswa berumur 11 tahun ke atas.¹³³

Tahun 1952, ketentuan di atas disempurnakan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 7/1952. Dalam peraturan ini jenjang pendidikan madrasah meliputi:

- (a) Madrasah Rendah, dengan masa belajar 6 tahun;
- (b) Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama, dengan lama belajar 3 tahun setelah tamat Madrasah Rendah;
- (c) Madrasah Lanjutan Tingkat Atas, dengan lama belajar 3 tahun setelah tamat Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama.¹³⁴

¹³³ Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam*, h. 53-54.

4. Madrasah dalam UU Nomor 4 Tahun 1950

Tahun 1950, tepatnya tanggal 5 April 1950, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4/1950 (Jo Undang-Undang Nomor 12/1954)¹³⁵ tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Dalam undang-undang ini, tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk “Membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bersusila serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air” (pasal 3).

Dari rumusan di atas belum nampak adanya perhatian serius pemerintah dalam membina mental spiritual dan keagamaan melalui proses pendidikan. Oleh sebab itu, keberadaan madrasah dalam undang-undang tersebut tidak disinggung secara khusus, kecuali pada pasal 10 (ayat 2) tentang Kewajiban Belajar, yang berbunyi : “Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar”.¹³⁶

5. Madrasah Wajib Belajar (MWB)

Untuk melaksanakan amanat UU Nomor 4/1950, khususnya tentang wajib belajar, pada tahun 1958 Departemen Agama memelopori berdirinya Madrasah

¹³⁴ Ibid., hlm. 54-55.

¹³⁵ Undang-Undang Nomor 4/1950 disahkan oleh “Presiden” Mr. Assaat dan Menteri PP dan K Ki S.Mangunsarkoro di ibukota RI Yogyakarta. Perlu diketahui bahwa pada bulan Desember 1949 Republik Indonesia mengalami perubahan ketatanegaraan menjadi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Republik Indonesia merupakan negara bagian dari RIS. Karena itu, Undang-Undang Nomor 4/1950 pada waktu diundangkan hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia di Yogyakarta. Tetapi pada waktu terbentuknya kembali NKRI (17 Agustus 1950), ditetapkan bahwa sambil menunggu undang-undang yang lebih sempurna, undang-undang di atas dapat dipergunakan untuk seluruh Indonesia. Keputusan ini diambil setelah undang-undang tersebut diterima DPR pada tanggal 27 Januari 1954, kemudian disahkan oleh pemerintah tanggal 12 Maret 1954 dan diundangkan pada tanggal 18 Maret 1954. Karena itu, undang-undang tersebut berbunyi Undang-Undang Nomor 12/1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 4/1950 untuk seluruh Indonesia. Baca lebih lanjut: I. Djumhur dan Danasuparta, *Sedjarah Pendidikan* (Bandung- Djakarta: Tjerdas, 1961), h. 161.

¹³⁶ Wasty Soemanto dan F.X. Soeyarno, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h. 172.

Wajib Belajar (MWB) dengan lama belajar 8 tahun. MWB diarahkan pada pembangunan jiwa bangsa untuk kemajuan di lapangan ekonomi, industrialisasi, dan transmigrasi. Materi pelajaran meliputi : pendidikan agama, umum, dan keterampilan untuk mendukung kesiapan anak untuk memproduksi atau bertransmigrasidengan swadaya. Kurikulum MWB merupakan gabungan dari tiga perkembangan; akal, hati nurani, dan keterampilan. Dengan komposisi mata pelajaran; 25% mata pelajaran agama dan 75% mata pelajaran umum dan keterampilan.¹³⁷

Lama belajar MWB 8 tahun, dengan pertimbangan bahwa pada usia 6 tahun anak sudah wajib sekolah dan setelah umur 15 tahun diizinkan mencari nafkah. Sayang, rintisan gemilang ini hanya bertahan sampai tahun 1970 karena tak didukung dana memadai.

Sejarah panjang keberadaan lembaga pendidikan madrasah di Indonesia sejak zaman kolonial kemudian pada awal kemerdekaan dan sampai pada akhirnya terbentuk pemerintahan Republik Indonesia dan berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia adalah awal berkembangnya pendidikan Islam Indonesia dalam bentuk pendidikan formal. Dengan adanya landasan yuridis tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah tahun 1950 maka dunia pendidikan mulai berkembang di Indonesia sejak saat itu.

Namun jauh sebelum adanya UU No. 4 tahun 1950, pendidikan madrasah di Indonesia telah ada dan berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia di beberapa wilayah Indonesia tidak terkecuali di Sumatera Selatan. Berdirinya sekolah Islam

¹³⁷ Daulay, *Historisitas dan Eksistensi*, h. 76.

di Indonesia sebelum kemerdekaan tidak terlepas dari peran dan fungsi para ulama pada masa sebelum kemerdekaan. Hal ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab moral para ulama untuk memberikan sumbangsih ilmu agama yang telah mereka miliki untuk diajarkan kepada masyarakat yang pada masa itu masih sangat minim dengan pendidikan, karena tidak adanya kebebasan bagi rakyat untuk mengenyam pendidikan yang berada dalam penguasaan kaum penjajah.

Sebagai seorang ulama yang ikut berperan dalam penyebaran agama Islam di Palembang, K.H. Abu Bakar Bastari juga tidak mengabaikan dunia pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan perannya sebagai seorang ulama yang selalu memberikan pengajaran dan bimbingan ilmu agama Islam kepada masyarakat, baik yang tinggal di sekitar wilayah rumahnya sendiri maupun tempat-tempat lain di wilayah Palembang maupun Sumatera Selatan.

Kepedulian K.H. Abu Bakar Bastari pada pendidikan Islam di Palembang pada masa sebelum kemerdekaan kemudian memunculkan sebuah lembaga pendidikan Islam, yaitu madrasah. Pada tahun 1926 pada saat beliau kembali ke desanya di Kota Negara, oleh para ulama Palembang diminta untuk segera kembali ke kota untuk mengadakan musyawarah tentang pendirian sekolah madrasah di Palembang dan dari hasil musyawarah tersebut terbentuklah “Madrasah Nurul Falah” tingkat Tsanawiyah dan beliau sendiri kemudian ditunjuk selaku direktornya.

Dalam waktu singkat, madrasah ini kebanjiran murid-murid dari berbagai pelosok daerah. Termasuk dari Lampung, Jambi, Bangka Belitung dan lainnya. Selain bergerak dibidang pendidikan, ia juga berdakwah dari langgar ke langgar,

mendirikan pengajian atau cawisan di beberapa tempat. K.H. Abu Bakar Bastari menduduki jabatan sebagai direktur madrasah Nurul Falah terhitung dari tahun 1926 hingga 1934.

Peran penting lainnya dalam pendidikan Islam, selain sebagai pendiri sekolah madrasah Nurul Falah yang setingkat Tsanawiyah, K.H. Abu Bakar Bastari adalah salah seorang pendiri berdirinya Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan (P.I.T.S.S) yang kemudian berubah menjadi IAIN Raden Fatah. K.H. Abu Bakar Bastari sendiri pernah menjabat sebagai Dekan pada Fakultas Sjarifah.

Pada saat pendirian Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan, K.H. Abu Bakar Bastari menjadi Dekan Fakultas Hukum Islam yang kemudian berubah menjadi Fakultas Sjarifah.

Namun dalam perjalanan sejarah ketokohan K.H. Abu Bakar Bastari tidaklah seperti tokoh ulama besar Palembang yang sampai saat ini masih dikenal dan diingat oleh masyarakat Palembang. Nama besar K.H. Abu Bakar Bastari yang dikenal pada masa beliau hidup yang berkiprah dan berperan dalam penyebaran serta pengembangan agama Islam di Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya tidak meninggalkan suatu karya monumental yang bisa dengan cepat dikenal oleh banyak orang. Walaupun ada satu peninggalan beliau yang sampai saat ini tetap eksis berdiri, yaitu Madrasah Nurul Falah yang terletak di daerah 30 Ilir Palembang.

Akan tetapi yang sangat disayangkan adalah Madrasah Nurul Falah yang didirikan dan dikembangkan oleh K.H. Abu Bakar Bastari tidak lagi menjadi milik keluarga K.H. Abu Bakar Bastari. Anak keturunan (zuriyat) K.H. Abu

Bakar Bastari tidak ada satupun yang meneruskan dan melanjutkan pengelolaan sekolah Madrasah Nurul Falah dengan alasan kesibukan dan tidak memiliki waktu serta fokus pada bidang pendidikan Islam meneruskan pengelolaan Madrasah Nurul Falah yang telah dirintis oleh ayahanda mereka, K.H. Abu Bakar Bastari. Sehingga pada akhirnya Madrasah Nurul Falah kepengurusannya diserahkan kepada donatur yang selama Madrasah Nurul Falah berdiri ada donatur-donatur yang memberikan bantuan untuk biaya operasional pendidikan. Saat ini yang tersisa hanyalah buku-buku lama dan tua peninggalan K.H. Abu Bakar Bastari yang masih tersimpan di rumah peninggalan beliau di daerah 30 Ilir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti ingin mengangkat kembali ketokohan dan peran K.H. Abu Bakar Bastari dalam penyebaran agama Islam di Palembang semasa beliau hidup. Penelitian ilmiah ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan referensi bagi masyarakat Palembang pada umumnya dan institusi pendidikan Islam pada khususnya, bahwa K.H. Abu Bakar Bastari adalah seorang tokoh ulama yang mumpuni dan memiliki banyak peran terhadap perkembangan Islam di Palembang, bahkan pada dunia pendidikan Islam. Kiprah K.H. Abu Bakar Bastari tidak hanya pendidikan pada tingkat Madrasah, tetapi juga pada tingkat pendidikan tinggi. K.H. Abu Bakar Bastari, di mana beliau adalah salah satu pelopor dan tokoh yang ikut andil berdirinya perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan pada tahun 1957 yang merupakan cikal bakal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah yang sekarang telah berubah menjadi universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah dan pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum Islam yang kemudian berubah menjadi Fakultas Syar'ah.

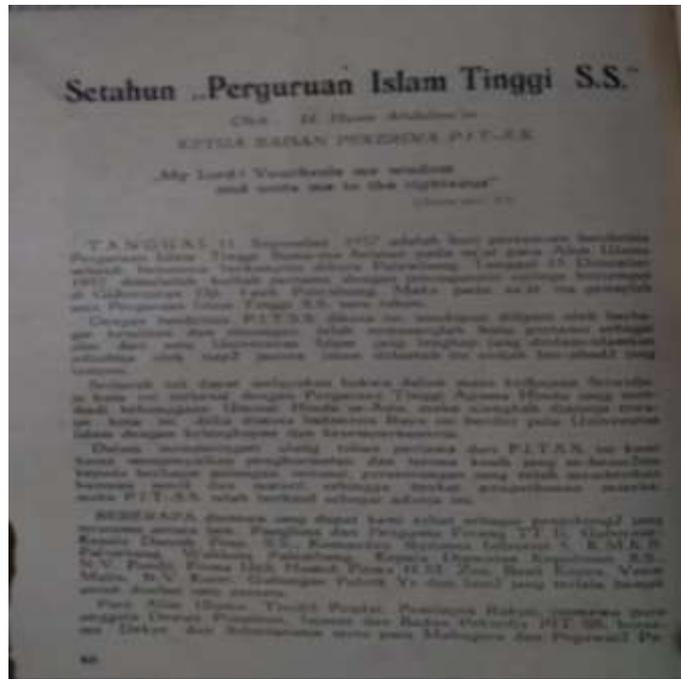
Dengan adanya karya penelitian ilmiah ini diharapkan dapat mengingatkan kita kembali bahwa ada seorang tokoh ulama besar yang pernah hidup pada masa tahun 1934-1971, dan dapat melestarikan salah satu peninggalan beliau yaitu “syair dua puluh lima nabi”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka didapatkan data pendukung sebagai bukti bahwa K.H. Abu bakar Bastari adalah sebagai salah seorang pendiri Perguruan Tinggi Sumatera Selatan pada tahun 1957 yang didapatkan dari zuriyat K.H. Abu Bakar Bastari, seperti terlihat pada gambar-gambar di bawah ini :

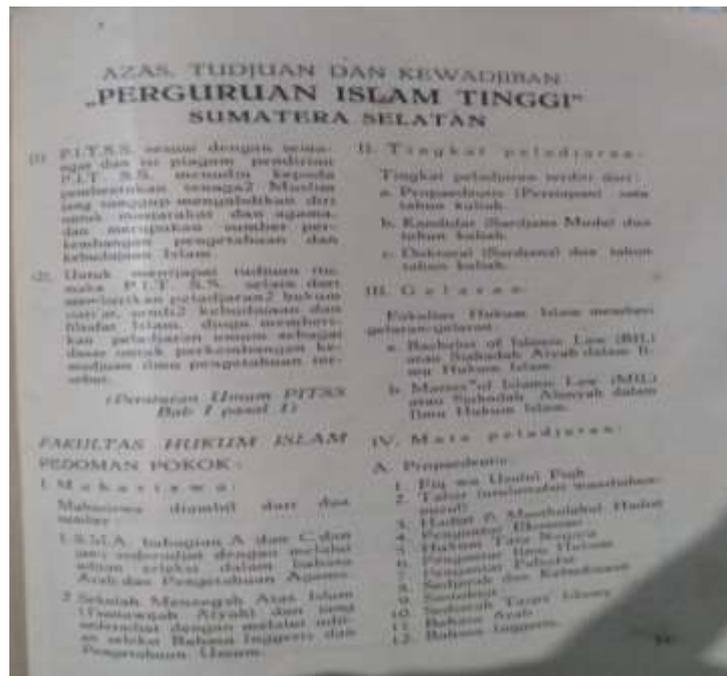
Gambar 4.3
Piagam Pendirian Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan
Tahun 1957



Gambar 4.4
Sambutan Ketua Badan Pekerja P.I.T.S.S
(Setahun Perguruan Islam Tinggi S.S)



Gambar 4.5
Azas, Tujuan dan Kewajiban P.I.T.S.S



Gambar 4.6
Daftar Dosen/Asisten P.I.T.S.S

Daftar para Dosen/Asisten

Nama	Kuliah
1. K.H. Abdul Ghani Saadiah Tawfik Islam	
2. Dikmar Adhian W.D.	Programa Pabulak
3. M.L. Yulung S.A.	Bahasa Inggris
4. M. Suman Sempur	Programa Tata Hukum di Indonesia
5. M.S. A. Hasmawati	Programa Tata Negara
6. Drs. M. Ng. Suman	Sociologi
7. K.H. Usad Wasthy	Uslah Fikih - Fiqih
8. Sunardiyan	Programa Ekstensi
9. J.A. Daryoga	Sedjarah dan Kebudayaan
10. K.H.Z. Fikri	Tarikh
11. K.H. Masrud Anas	Taqrib dan Bahasa Arab
12. K.H.A. Rifan	Bahasa Arab dan Fiqih Fikih Islam
13. M. Adnan	Bahasa Inggris
14. Saadiah	Komputer
15. Mochtar Elhendy	Ekologi

Gambar 4.7
Daftar Dosen/Asisten P.I.T.S.S

DAFTAR PARA MAHASISWA GOLOONGAN A

1. Yusuf Sidi	26. Saiful Uddin Jusaid
2. M. Saadiah	27. Zaidi Saad Zaidan
3. M. Saadiah	28. Husein, Idris
4. M. Saadiah	29. Anis Idris
5. M. Saadiah	30. M. Saadiah
6. M. Saadiah	31. M. Saadiah
7. M. Saadiah	32. M. Saadiah
8. M. Saadiah	33. M. Saadiah
9. M. Saadiah	34. M. Saadiah
10. M. Saadiah	35. M. Saadiah
11. M. Saadiah	36. M. Saadiah
12. M. Saadiah	37. M. Saadiah
13. M. Saadiah	38. M. Saadiah
14. M. Saadiah	39. M. Saadiah
15. M. Saadiah	40. M. Saadiah
16. M. Saadiah	41. M. Saadiah
17. M. Saadiah	42. M. Saadiah
18. M. Saadiah	43. M. Saadiah
19. M. Saadiah	44. M. Saadiah
20. M. Saadiah	45. M. Saadiah
21. M. Saadiah	46. M. Saadiah
22. M. Saadiah	47. M. Saadiah
23. M. Saadiah	48. M. Saadiah
24. M. Saadiah	49. M. Saadiah
25. M. Saadiah	50. M. Saadiah

DAFTAR MAHASISWA GOLOONGAN B

1. M. Saadiah	26. M. Saadiah
2. M. Saadiah	27. M. Saadiah
3. M. Saadiah	28. M. Saadiah
4. M. Saadiah	29. M. Saadiah
5. M. Saadiah	30. M. Saadiah
6. M. Saadiah	31. M. Saadiah
7. M. Saadiah	32. M. Saadiah
8. M. Saadiah	33. M. Saadiah
9. M. Saadiah	34. M. Saadiah
10. M. Saadiah	35. M. Saadiah
11. M. Saadiah	36. M. Saadiah
12. M. Saadiah	37. M. Saadiah
13. M. Saadiah	38. M. Saadiah
14. M. Saadiah	39. M. Saadiah
15. M. Saadiah	40. M. Saadiah
16. M. Saadiah	41. M. Saadiah
17. M. Saadiah	42. M. Saadiah
18. M. Saadiah	43. M. Saadiah
19. M. Saadiah	44. M. Saadiah
20. M. Saadiah	45. M. Saadiah
21. M. Saadiah	46. M. Saadiah
22. M. Saadiah	47. M. Saadiah
23. M. Saadiah	48. M. Saadiah
24. M. Saadiah	49. M. Saadiah
25. M. Saadiah	50. M. Saadiah

Gambar 4.8
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Islam



Gambar 4.9
Penyerahan Lambang I.A.I.N
(Perubahan FHI menjadi Fakultas Sjari'ah)



Penyerahan lambang I.A.I.N. dari Pres. Al-Djam'ah kepada Dekan Fakultas Sjari'ah setelah peresmian FHI dan PM menjadi Fakultas Sjari'ah IAIN Tjabang Palembang.

Dari data di atas, maka dapat diketahui perkembangan pendidikan Islam tidak hanya berkembang pada tingkat pendidikan madrasah saja namun setelah

pada masa kemerdekaan K.H. Abu Bakar Bastari juga ikut andil dalam pengembangan pendidikan tinggi di Sumatera Selatan. Perkembangan pendidikan tinggi Islam di Sumatera Selatan terus berkembang dan sampai pada akhirnya menjadi sebuah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah dan sekarang berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah.

Gambar 4.10
Gedung FHI dan PM
Di Gedung Perjuangan jalan Kepandean no. 30 Palembang



Salah satu peran K.H. Abubakar Bastari selain sebagai penggagas, pengajar dan pengembang Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan yang Menjadi IAIN Raden Fatah Palembang adalah beliau juga pejuang yang ikut berkontribusi dalam perebutan Gedung IAIN yang sekarang ini UIN Raden Fatah Palembang yang terletak di KM 3,5 Jalan K.H. Zainal Abidin Fikri dari sekolah Budha pada masa itu. Peran K.H. Abu Bakar Bastari dalam dunia pendidikan

Islam adalah salah satu jasa beliau yang tidak seharusnya dilupakan, karena ini adalah bukti begitu besar peran seorang ulama dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat mulai dari peran beliau sebagai guru dan mubaligh dalam bidang agama Islam yang memberikan pencerahan kepada masyarakat pada masa beliau hidup, juga memiliki peran dalam pendidikan tingkat dasar dan tinggi.

C. Kiprah dan Pengabdianannya di Bidang Birokrasi

K.H. Abubakar Bastari (1898-1971): Kiprah dan Pengabdianannya pada Perkembangan Islam di Palembang memiliki peran yang cukup besar terhadap perkembangan Islam di Palembang pada khususnya juga Sumatera Selatan. Kiprah K.H. Abubakar Bastari terhadap perkembangan Islam tidak hanya terbatas pada bidang ilmu agama saja, namun juga bidang Birokrasi.

Dalam bidang politik dan organisasi keagamaan, K.H. Bastari adalah ulama yang menjadi Anggota Majelis Sjuro (Masjumi) Sumatera Selatan dan menjadi anggota konstituante Republik Indonesia dari fraksi partai Masjumi. Selain itu K.H. Abu Bakar Bastari juga aktif dalam organisasi keagamaan hal ini terbukti dengan berbagai jabatan yang beliau sandang, seperti Ketua Amak Djarijah di daerah 30 Ilir Palembang, Ketua Majelis Ulama Palembang, Ketua Sjari'ah NU Palembang, Ketua Idjtihadil Ulama Majelis Ulama Palembang, sehingga di sini terlihat bagaimana peran beliau terhadap pengembangan dan penyebaran agama Islam di Kota Palembang mulai tahun 1926 sampai tahun 1959.

Sebagai seorang ulama K.H. Abu Bakar Bastari pernah memberikan kata sambutan untuk penutupan Kongres Majelis Ulama seluruh Sumatera, seperti dikutip di bawah ini :

“Assalamu’alaikum wr.wb. Izinkanlah saya pada malam ini, untuk mewakili Syeh Sulaiman Ar-Rasuli Ketua Majelis Ulama Sumatera yang karenanya kesehatan beliau terganggu untuk menyampaikan kata sepatah dua dalam resepsi penutup Kongres Alim Ulama Se-Indonesia di Palembang ini. Kalau dahulu Kongres Alim Ulama Se-Sumatera telah berlangsung di Bukit Tinggi maka kini Kongres Alim Ulama Se-Indonesia telah berlangsung di kota Palembang. Kongres yang berlalu adalah bersifat Sumatera. Dan Kongres yang sekarang ini bersifat Indonesia, maka untuk masa depan kita anjurkan lagi Kongres Alim Ulama Seluruh Dunia. Kami dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Sumatera tidak dapat menggambarkan bagaimana syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta terimakasih kami kepada Alim Ulama yang telah berkumpul hadir untuk melaksanakan Syura Bainahum, agar titah yang telah diamanahkan sebagai *Warosatul Ambiya* dapat pula terlaksana. Sesuai dengan anjuran sebuah Hadits Nabi yang mengatakan: “*Kalau kemungkaran yang berlaku dalam satu negeri dibiarkan saja oleh para ulama maka ulamalah yang bertanggung jawabkan hal yang seperti itu.*” Tadi sudah dibacakan hasil kongres seluruh Indonesia maka sudah barang tentu Ulama-ulama mempunyai satu kewajiban untuk menjalankan putusan yang telah diambil dalam Kongres Alim Ulama Se-Indonesia ini. Dengan demikian semoga Tuhan akan membawa ummat Negara R.I. ini kepada keselamatan dan kemakmuran untukselama-lamanya. Tugas ulama bukanlah buat sementara akan tetapi berakhir sampai ia menutup mata untuk kali yang penghabisan. Oleh sebab itu kami atas nama Majelis Ulama Sumatera mengucapkan terimakasih disamping mendo’a kepada Tuhan semoga seluruh Ulama Indonesia akan hidup bersatu padu untuk melaksanakan kewajiban sebagai yang telah ditegaskan oleh Nabi dengan selamat dan Sentosa untuk melaksanakan cita-cita yang baik guna keselamatan Negara seluruhnya. Sekedar demikian saudara-saudara kata penutup atas nama Ketua Majelis Ulama Sumatera.¹³⁸

Kiprah lain K.H. Abu Bakar Bastari yang tak kalah penting adalah perannya adalah dalam dunia politik Indonesia, di mana beliau merupakan salah satu anggota konstituante dari fraksi partai Masjumi, seperti data yang berhasil peneliti himpun berikut ini :

¹³⁸ Dokumentasi, *Panitia Kongres Alim Ulama Seluruh Indonesia*, Buku Mukhtamar Ulama Se-Indonesia di Palembang tgl 8-11 September 1957, h. 4

Profil Anggota Konstituante Republik Indonesia



K.H. Abubakar Bastari

No. Anggota : #93
 Fraksi : Masjumi
 Tanggal Lahir : 5 December 1896
 Tempat Lahir : Kota Palembang, Sumatera Selatan

Agama : Islam
 Tipe Anggota : Pengganti
 Alamat : Lrg. Kota Batu 30 Ilir Kota Palembang, Sum-Sel.

Pendidikan

Tahun Mulai	Tahun Akhir	Pendidikan	Pendidikan
-	1910	Sek. Rakjat beridjazah th. 1910	ELS/SR (SD)/Sederajat
-	1920	Sek. Solatiah Bag. Tinggi di Makkah beridjazah th. 1339	S1 Bachelor/Sederajat
-	1923	Lulus udjian Ulama Mulazimin Pemerintah Sarif Husen th. 1342	S1 Bachelor/Sederajat

Riwayat Hidup

Tahun Mulai	Tahun Akhir	Pekerjaan	Pergerakan
-	-		Angg. Madjelis Sjuro (Masjumi) SS hingga sekarang
1926	1929	Mengadjar di Sek. Solatiah Makkah	-
1926	1929	Mengadjar di Masdjidil Haram di Makkah	
1926	1929	Guru Kep. Sek. Nurulfalah Kaju Agung Palembang S.S.	
1929	1942		Ketua Amal Djarjah 30 Ilir Palembang
1930	1935		Ketua Madjelis Ulama Palembang
1930	1935		Ketua Madjelis Ulama Palembang
1930	1935		Ketua Sjarijah NU Palembang
1934	-	Direktur Sek. Nurulfalah Sjanawijah Palembang	
1936	-	Hakim Agama di Palembang	
1937	1942		Ketua Idjtihadil Ulama Madjelis Ulama Palembang
1946	1950	Wk. Kep. Djwt Agama Ketua Mahkamah Sjarijah Kares. Palembang	
1946	1956	Angg. DPR Kobes Palembang	
1950	1952	Ketua Mahkamah Sjarijah Prop. Sum. Sel.	
1955	-	Ketua Pengadilan Agama	
14 Februar y 1957	5 July 1959	Anggota Konstituante Republik Indonesia	

Sumber : http://www.konstituante.net/id/profile/MASJUMI_abubakar_bastari

Gambar 4.2

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat kita ketahui bahwa K.H. Abu Bakar Bastari memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan penyebaran agama Islam dan berpartisipasi aktif dalam organisasi keagamaan dan politik di Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya.

K.H. Abu Bakar Bastari juga pernah menduduki jabatan sebagai seorang Hakim Agama di Palembang dan juga menjabat sebagai ketua organisasi keagamaan yang ada di Palembang. Di sisa umurnya, beliau gunakan untuk mengabdikan di masyarakat sebagai tempat bertanya seputar *problem* sosial keagamaan. K.H. Abubakar Bastari wafat pada usia 73 tahun dan dimakamkan di 30 Ilir. Makamnya berdampingan dengan makam istri tercinta yaitu Hj. Niswah.

Gambar 4.11

Makam K.H. Abubakar Bastari beserta istrinya Hj. Niswah

